

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Arief, Barda Nawawi & Muladi, *Teori – Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung : Alumni, 2005), hlm. 1Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008).
- Chalmers, A.F., *Apa Itu Yang Dinamakan Ilmu?* (Jakarta : Hasta Mitra, 1983)
- Chazawi, Adam,*Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)* (Depok : Raja Grafindo, 2016).
- Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).
- Hadjon, Philipus M., dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Kedua* (Yogyakarta : Gajahmada University Press, 2012).
- Kaligis, O.C., *Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Dalam Tugas Kedinasan Pasca UU No. 30 Tahun 2014* (Jakarta : P.T. Alumni, 2015).
- Lamintang, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung : Sinar Baru,1984).
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011).
- Minarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2008)
- Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana* (Jakarta : Bina Aksara, 1987).

- Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991).
- Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi* (Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 2009).
- Sunarso, Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981).
- Suteki, dan Galang Taufani , *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok:PT RajaGrafindo Persada, 2018)
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011).

## **B. Jurnal Ilmiah :**

- Andika, Auliah, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 2010)
- Mochamad Yuliandra, dan Pujiyono, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Daerah*”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, No. 4, ( 4 Oktober 2012).

Pujiyono, Moch Juli dan Sigit Sapto Nugroho, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, *Jurnal Sosial Volume 15, No. 1*, (4 Maret 2014).

Budiningsih, Widyawati dan Jefri Hardi, *Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan*, *Jurnal Hukum, Volume XIX, No. 19*, (Oktober 2010).

### **C. Peraturan Perundang - Undangan :**

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Pada Inspektorat Kabupaten Demak

Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;

Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Strategis Nasional;

Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH Nomor 119 – 49 Tahun 2018, Nomor B-369/F/Fjp/02/2018, dan Nomor B/9/II/2018.

**D. Wawancara :**

Esti Adhi, Wawancara, Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Demak (Semarang : 7 April 2019);

Roni, Wawancara, Kepala Unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Demak (Demak : 9 April 2019);

Khusnul, Wawancara, Anggota Unit II Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Demak (Demak : 12 April 2019);

Echo, Wawancara, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Demak (Demak, 15 April 2019).

**E. Internet :**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt569927199518f/ke-wenangan-jaksa-melakukan-penyelidikan>, diakses pada tanggal 15 April 2019 pukul 16.18 WIB

<https://antikorupsi.org/id/news/apa-beda-keppres-perpres-inpresdiakses>  
pada 15 April 2019 pukul 20.46 WIB.